

ISBN 978-602-60289-0-7



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN (SEMDIK)

PROFESI GURU MENGHADAPI TANTANGAN
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

HOTEL MERCURE PADANG, 24 SEPTEMBER 2016



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN (SEMDIK)
“PROFESI GURU DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)”

ISBN: 978-602-60289-0-7

SUSUNAN EDITORIAL

Penanggungjawab: Drs. Khairul, M.Sc.

Tim Reviewer

Ketua Drs. Yusrizal, M.Si.
Anggota Prof. Dr. Mukhaiyar, M.Pd
 Prof. Dr. Shirjon David
 Dra. Hj. Syofiani, M.Pd.
 Dra. Rita Desfitri, M.Sc.
 Dra. Ernati, M.Pd.
 Dra. Pebriyeni, M.Si
 Dra. Gusmaweti, M.Si.
 Dr. M. Sahnan, M.Pd.
 Drs. Khairudin, M.Si
 Dr. Wirnita Eska, S.Pd.M.M.
 Romi Isnanda, S.Pd., M.Pd.

Ketua Panitia Pelaksana Dr. Wirnita Eska, S.Pd.M.M.
Sekretaris Romi Isnanda, S.Pd.M.Pd.

Tim Editor

Dr. Hendra Hidayat, M.Pd.
Dr. Lely Refnita, M.Pd.
Drs. Edrizon
Ashabul Khairi, ST.M.Kom
Eril Syahmaidi, S.Pd.M.Pd

Cover Lay out
Wit, Romi, Das

Penerbit:
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta



SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN (SEMDIK)
FKIP UNIVERSITAS BUNG HATTA



PROFESI GURU DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MEA

Hotel Mercure, 24 September 2016

N o.	Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab
1.	07.30-08.15	Registrasi Peserta	Sie. Acara
2.	08.15-08.20	Pembukaan	Fivi Septiani, S.H.
3.	08.20-08.25	Tari Pasambahan	Sie. Acara
4.	08.25-08.30	1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Sie. Acara
5.	08.30-08.35	2. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran	Rosi Basnia
6.	08.35-08.40	3. Laporan Ketua Panitia	Dr. Wirnita Eska, S.Pd., M.M
7.	08.40-08.45	4. Sambutan Rektor	Rektor Univerisitas Bung Hatta Prof. Dr. Niki Lukviarman, S.E., Akt, MBA.
	08.45-08.50	5.Sambutan Wakil Gubernur Sekaligus Membuka Acara Seminar Nasional	Nasrul Abit
8.	08.50-09.00	Pembacaan Doa	Dr. Muslim Tawaqal, SH,,M.H.
9.	09.00-09.45	Pemutaran Film Dokumenter Perjuangan dan Pemikiran Bung Hatta	Perpustakaan Nasional RI UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi
10.	09.45-12.00	<p>Narasumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit. Topik: Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Guru dalam Menyikapi MEA 2. Koordinator Kopertis Wilayah X Prof. Drs. John Hendri, Ph.D Topik: Upaya Kopertis Wilayah X Penyamaan Visi PTS dalam Menyikapi MEA 3. Rektor Universitas Bung Hatta Padang Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, Akt, MBA Topik: Peningkatan Kompetensi Calon Guru dalam Menyikapi MEA 	<p>Moderator: Dra. Susi Herawati, M.Pd.</p>
11	12.00.13-00	ISHOMA	Sie. Konsumsi, Sie. Acara, Sie Perlengkapan

12.	13.00- 15.00	Keynote Speaker Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhajir Effendy, MAP.	Moderator: Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, Akt, MBA
13.	15.30-17.50	Presentasi Pemakalah (Paralel untuk 4 ruangan)	Sie. Acara, Sie. Sekretariat, Sie. Konsumsi, Sie. Perengkapan, Sie. Humas

**Panitia Pelaksana Sminar Nasional Pendidikan (SEMDIK)
FKIP Universitas Bung Hatta**

Dr. Wirnita Eska, S.Pd.M.M
Ketua

Romi Isnanda, S.Pd.,M.M
Sekretaris



SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN (SEMDIK)
PROFESI GURU DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Kampus Proklamator II, FKIP Universitas Bung Hatta
Jl. Bagindo Aziz Chan, Aie Pacah Padang



DAFTAR ISI

Halaman Judul	Halaman
Susunan Editorial	i
Sambutan Rektor Universitas Bung Hatta	ii
Sambutan Dekan FKIP Universitas Bung Hatta	iii
Jadwal Acara	iv
Daftar Isi	v
KEYNOTE SPEAKER (Resume)	1-2
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendi,MAP. PROFESI GURU DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)	
MAKALAH PESERTA	
KESIAPAN MAHASISWA PENDIDIKAN KEJURUAN MEMASUKI DUNIA KERJA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Ade Fitri Rahmadani, S.Pd.M.Pd. (PTIK FKIP Universitas Bung Hatta)	3-7
MODEL PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS BERBASIS BUDAYA DAN PENGELOLAANNYA DI DALAM ERA KEBEBASAN EKONOMI Adzanil Prima Septy, Ph.D. (PING FKIP Universitas Bung Hatta)	8-17
URGENSI PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KEPEMIMPINAN GURU Dr. Ahmad Fauzan, M.Si. (IAIN Raden Intan Lampung)	18-25
KESIAPAN GURU MATEMATIKA DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S. Si., M.,Pd. (IAIN Padangsidempuan)	26-31
KETERAMPILAN KOMUNIKASI GURU UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME DALAM PROSES PEMBELAJARAN Ahmad Zaini, S.Ag, M.Pd/ Rahma Wira Nita, M.Pd.,Kons. (STKIP PGRI Sumatera Barat)	32-40

PENGARUH PENDEKATAN <i>SCIENTIFIC</i> TERHADAP MOTIVASI BELAJAR TEMATIK TERPADU DI KELAS I SEKOLAH DASAR NEGERI 28 PADANG LAWEH KABUPATEN SIJUNJUNG. Fauziah, S.Pd.M.Pd. (FKIP Universitas Bung Hatta)	135-142
KEKUATAN EKONOMI GURU ANAK USIA DINI TERHADAP LIMBAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Dr. Farida Mayar, M.Pd. (FIP Universitas Negeri Padang)	143-153
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Fifi Yasmi, S.Pd.I., M.Pd (STKIP PGRI Sumatera Barat)	154-160
<i>UTILIZATION LABORATORY AND RELATIONSHIP WITH OUTCOMES BIOLOGY STUDENT CLASS XI SMAN OF PARIAMAN</i> Gusmaweti, Meri Humaira, Ardi (Biology Education Studies Program The Faculty of Education University of Bung Hatta)	161-170
BAHASA INDONESIA HARUS MENJADI TUAN RUMAH DI NEGARA SENDIRI Dra. Gusnetti, M.Pd. (PINDO FKIP Universitas Bung Hatta)	171-176
PROFESI GURU DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI Gusmaida, S.Pd (Guru SLBN 2 Padang)	177-187
MEWUJUDKAN PROFESIONALISME GURU DI INDONESIA Hendrizar, S.IP., M.Pd. (PGSD FKIP Universitas Bung Hatta)	188-199
INTERNALISASI PENDIDIKAN MITIGASI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI MENURUT TEORI BELAJAR Dr. Herix Sonata M.S., M.Si.	200-210
<i>BLENDED LEARNING</i> SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN ABAD 21 Iga Setia Utami, S.Pd., M.Pd.T. (PTIK FKIP Universitas Bung Hatta)	211-221
PARADIGMA BARU PENDIDIKAN MENUJU “CIVIL SOCIETY” (TELAAH ISU-ISU KRITIS PENDIDIKAN NASIONAL, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA) Dr. Indra Jaya, M.Pd., UIN Sumatera Utara Medan	222-230
PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH DASAR Ira Rahmayuni Jusar, S.Si., M.Pd. (PGSD FKIP Universitas Bung Hatta)	231-237
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA DALAM MENGHADAPI MEA Jaenam, M.Pd. (STKIP PGRI Sumatera Barat)	238-249

MEMBANGUN KARAKTER CALON GURU SD DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MEA Yulfia Nora, S.Pd.,M.Pd. (PGSD FKIP Universitas Bung Hatta)	542-549
BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA INTERNASIONAL DALAM MENGHADAPI MEA Yulia Helti, S.Pd., M.Pd dan Dra. Elvina A. Saibi, M.Hum. (U niversitas Bung Hatta)	550-555
PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH Yulianis, S.Pd. (Guru SLB Perwari Padang)	556-561
PERANAN GURU MATEMATIKA UNTUK MEMBUAT BIBIT BARU YANG LEBIH BERKUALITAS DI ERA MEA Yusri Wahyuni (PMAT FKIP Universitas Bung Hatta)	562-567
AKTUALISASI NILAI-NILAI KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PPKn MELALU PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME Drs. Yusrizal, M.Si. (PPKn FKIP Universitas Bung Hatta)	568-576
PENDIDIKAN MENUJU MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) Dr. Yusida Imran, M.Pd., Kons (Sekolah Tinggi Agama Islam YKI Sumbar)	577-587
KOMPETENSI LULUSAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Dra. Zulfa Amrina, M.Pd. (FKIP Universitas Bung Hatta)	588-595



**PARADIGMA BARU PENDIDIKAN MENUJU “CIVIL SOCIETY”
(TELAAH ISU-ISU KRITIS PENDIDIKAN NASIONAL,
ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMECAHANNYA)**

Dr. Indra Jaya, M.Pd
UIN Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

The educational system and values have developed very fast, urged by the spirit of reformation in various aspects of human life. The demand for the formation of a civil society has made education one very effective way to approach it. For that purpose, there needs to be a change towards a new paradigm which must be followed with a review application on the critical issue-issue of the national educational, the direction of its policies, and its strategies of problem solving.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat dunia yang senantiasa berkembang dari masa ke masa memaksa setiap bangsa untuk bekerja keras mengejar ketinggalannya dalam segala bidang. Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengertian mempunyai sifat inovatif-kreatif. Menguasai iptek dan informasi secara memadai adalah kunci untuk menjawab berbagai tantangan baru yang lebih berat sehubungan dengan hadirnya era globalisasi dan informasi.

Pada dasarnya, manusia dapat berjalan sendiri. Namun, hanya sebagian kecil saja yang dapat memenuhi tingkat pengetahuan dan kemampuan yang diminta. Pendidikan sekolah menjadi sarana yang paling efektif. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur sistem pendidikan nasional dan implementasinya akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Namun, krisis yang kronis memaksa kita harus menatap ulang sistem kehidupan masyarakat kita termasuk Sistem Pendidikan Nasional. Ketika kita dipaksa memasuki era millenium ketiga yang lebih menantang, justru kita sedang berada dalam kondisi terpuruk. Akibatnya, kurang mapannya sistem kehidupan dan juga sistem pendidikan kita selama ini. Berbagai kelemahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem yang kita miliki, seperti kita harus memaksa diri dengan kesadaran penuh untuk segera memperbaiki sistem yang kita miliki dengan memacu pada tujuan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*). Sistem pendidikan pun harus mengalami penyesuaian-penyesuaian mengikuti “trend” ke arah pembentukan masyarakat yang lebih mandiri, merdeka dan sedikit sekali ketergantungannya terhadap birokrasi. Peranan birokrasi yang selama ini begitu dominan mewarnai sistem pendidikan nasional tentu secara perlahan-lahan harus dirubah, salah satunya dengan menghilangkan sistem sentralisasi pendidikan secara bertahap. Dengan



demikian, maka diperlukan paradigma baru pendidikan nasional. Dengan mengacu pada paradigma baru pendidikan ini perlu dilakukan telaah penerapan paradigma baru pendidikan terhadap isu-isu kritis pendidikan nasional, arah kebijakan dan strategi pemecahannya.

B. PEMBAHASAN

1. Paradigma Baru Pendidikan

Sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini nyata-nyata memiliki banyak kekurangan baik ditinjau dari segi muatan, pengelolaan, maupun arah kebijakan. Untuk itu, diperlukan reformasi yang cukup mendasar terhadap pendidikan nasional.

Kalau pemerintah berniat untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan menurut Djohar, jangan tanggung-tanggung³. Perlu dilakukan perubahan mendasar dalam sistem pendidikan kita, termasuk di dalamnya dengan mengubah UU Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Tanpa pembaharuan sistem secara mendasar, hanya sekedar omong kosong jika ingin melakukan perubahan dalam pendidikan kita. Kini, bukan lagi waktunya membebaskan pendidikan pada sekolah. Sudah saatnya institusi masyarakat menjadi institusi pendidikan sehingga pendidikan tidak berarti hanya sekolahan tetapi juga keluarga, dan masyarakat. "Masyarakat tidak berarti yang abstrak, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi masyarakat, termasuk didalamnya organisasi olahraga, dan organisasi partai politik". Selama ini, tidak pernah sanksi terhadap institusi masyarakat, sebagai contoh sinetron. Kita selalu disuguhkan dengan tayangan media elektronik dengan adegan-adegan kekerasan, *brokem home*, pelacuran, minuman keras, dan seks bebas. Namun, masyarakat tidak banyak yang memprotes, apalagi menegurnya karena tidak ada undang-undangnya. Dalam olahraga misalnya, ada kasus bonek yang acap kali membuat tindak kekerasan, tetapi selama ini tidak pernah ditegur karena tidak ada undang-undangnya. "tidak ada hukum yang mengatakan bahwa mereka juga harus mendidik masyarakat".

Bagaimana mengubah paradigma pendidikan kita. Ada sepuluh paradigma baru pendidikan yang ditawarkan oleh "Johar"⁴. 1) pendidikan adalah proses pembebasan, 2) pendidikan adalah sebagai proses pencerdasan, 3) pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak, 4) pendidikan menghasilkan tindak perdamaian, 5) pendidikan adalah proses pemberdayaan potensi manusia, 6) pendidikan menjadikan anak berwawasan integratif, 7) pendidikan menjadi wahana membangun watak persatuan, 8) pendidikan menghasilkan manusia demokratis, 9) pendidikan menghasilkan manusia yang peduli lingkungan, 10) sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan.

Dari sepuluh paradigma yang ditawarkan Johar, penulis beranggapan bahwa yang dimaksud dengan paradigma baru pendidikan adalah pendidikan yang mengacu pada tuntutan globalisasi yang bercirikan kebebasan dalam pengembangan potensi dan bersifat demokratis dalam pengelolaan dan pelaksanaannya memperhatikan kesimbangan dan terintegrasi dengan pendidikan rohaniah sehingga perlu penanganan pendidikan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

³ Djohar. Kedaulatan Rakyat, 4 Mei 1999.

⁴ Ibid



Reformasi pendidikan juga harus menyentuh kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum yang ada saat ini bersifat seragam sedangkan kondisi masyarakat masing-masing daerah di Indonesia beragam. Karena itu, saatnya mengembangkan konsep *diversitas*, karena penyeragaman (*uniformitas*) yang ada ternyata mengakibatkan matinya kreativitas. Padahal, kreativitas itu harus ada pada setiap jiwa masyarakat untuk dapat mengembangkan diri menuju terbentuknya masyarakat madani.

Masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari kata "*civil society*" disebut juga "*independent society*", secara harfiah berarti masyarakat yang ketergantungannya terhadap pemerintah relatif kecil, yang umumnya tersentuh oleh peradaban maju. Sesuai dengan ciri masyarakat yang berperadaban maka dalam kehidupan politiknyan masyarakat tidak mudah dipatronasi, masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah sendiri, masyarakat yang tahu apa yang harus dilakukan, dan masyarakat yang tidak terus-menerus minta dilindungi atau dibantu. Masyarakat yang merdeka, memahami hak dan kewajiban sebagai individu atau masyarakat, serta berdaya dalam mengekspresikan kehendaknya dan dalam menentukan kebijakan untuk kesejahteraan hidupnya.

Pada intinya, masyarakat madani adalah masyarakat yang tidak terlalu tergantung pada peran penguasa negara. Ia adalah masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Kesadaran kolektif ini harus terekspresikan pula dalam kesadaran sejarah, kesadaran tentang fakta sosial, dan kesadaran tentang martabat manusia sebagai makhluk yang merdeka, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah masyarakat.

Dalam upaya mencapai kehidupan masyarakat madani, diperlukan telaah dan kajian kritis mengenai isu-isu pendidikan nasional, arah kebijakan, dan strategi pemecahannya. Kajian ini sangat diperlukan sebagai landasan untuk menuju paradigma baru pendidikan nasional. Isu-isu kritis pendidikan nasional, arah kebijakan dan strategi pemecahan masalahnya merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

Sistem Pendidikan Nasional yang baik akan melahirkan generasi baru penerus harapan bangsa dan akan mengantarkan bangsa ini menuju masyarakat madani yang dicita-citakan. Namun, ternyata implementasinya tidaklah seindah konsepnya, terbukti dengan gagalnya sistem pendidikan kita melahirkan generasi yang dicita-citakan itu. Untuk itu, beberapa langkah berikut harus diprioritaskan oleh penyelenggaran negara :

1. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan.
2. Peningkatan profesionalisme, integritas dan penghargaan kepada guru/pendidik.
3. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang seimbang.
4. Evaluasi berkesinambungan terhadap sistem pendidikan nasional.

Keempat langkah prioritas di atas harus dikemas dalam satu paradigma, yaitu pendidikan yang mengacu pada tuntutan globalisasi yang bercirikan kebebasan dalam pengembangan potensi dan bersifat demokratis dalam pengelolaan dan pelaksanaannya, memperhatikan keseimbangan alamiah, dan terintegrasi dengan pendidikan rohaniah sehingga perlu penanganan pendidikan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Dengan demikian, peran pendidikan nasional dalam membentuk kepribadian bangsa yang sangat



mengutamakan nilai-nilai religius dalam segenap aspek kehidupannya, harus terus dikokohkan.

2. Isu-Isu Kritis Pendidikan

Jika kita amati sekilas, isu-isu kritis dalam pendidikan nasional kita tampak pada tiga indikator utama, yaitu :

- a. Merosotnya mutu hasil belajar siswa.
- b. Ketidakjelasan relevansi pendidikan sekolah dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat.
- c. Rendahnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan persekolahan.

Isu-isu kritis pendidikan nasional yang dimaksudkan tidak hanya ditimbang dari sudut "*ilmiah pedagogik*" semata, tetapi juga dari sudut "*ilmiah syari'iyah*". Jika dipetakan, isu-isu kritis pendidikan nasional tampak pada tiga wilayah atau ruang lingkup utama, yaitu :

3. Wilayah Mikro Operasional

Isu-isu kritis pendidikan pada ruang ini muncul dan ditemukan di ruang kelas, tempat siswa secara langsung berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran. Telah diidentifikasi secara meluas bahwa penyebab langsung rendahnya mutu hasil belajar siswa berkisar pada tiga persoalan utama :

- a. Kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dalam mengelola pembelajaran.
- b. Fasilitas sistem evaluasi hasil belajar, serta.
- c. Kualitas dan latar belakang siswa sebagai objek sekaligus sebagai subjek pendidikan.

Isu-isu kritis tentang tenaga pendidik menonjol terjadinya disebabkan tidak terjadinya kesepadanan antara kebutuhan lapangan dengan penyiapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan kewajiban penempatannya, serta migrasi tenaga guru dari daerah terpencil atau pedesaan ke perkotaan. Isu-isu kritis tentang tenaga pendidik ini menyangkut kebijakan yang lebih luas dan memerlukan "*action*" yang "*fair*" untuk memperbaikinya secara sistematis.

Selain isu-isu kritis tentang tenaga pendidik, masalah lain yang kerap kali muncul dalam wilayah mikro operasional adalah masalah evaluasi hasil belajar yang terkait dengan bentuk, frekuensi, dan cara evaluasi belajar siswa. Ujian diberikan hanya pada akhir proses belajar menggunakan tes objektif sehingga peserta didik cenderung hanya bisa menghafal.

Isu-isu kritis lain dalam wilayah mikro operasional ini adalah masih tingginya angka putus sekolah serta angka tidak melanjutkan. Siswa sebagai objek dan sekaligus subjek pembelajaran merupakan isu-isu kritis yang cukup serius dan kompleks karena menyangkut interaksi berbagai faktor tingkat kelenturan sistem dan "*policy*" yang diterapkan oleh sekolah dan guru (serta elemen-elemen pemerintahan yang mengontrolnya secara ketat), aspirasi pendidikan, dan nilai ekonomi anak di mata orang tuanya serta aspek-aspek perbedaan individual para peserta didik.

Karena pada wilayah ini, siswa berinteraksi langsung dengan anasir pendidikan maka penelusuran isu-isu kritis dan langkah-langkah awal untuk perbaikan perlu dimulai



dari titik ini. Pada skala tersebut, menempatkan guru dengan mutu terbaik untuk mengelola aspek operasional pendidikan dengan sendirinya menjadi pilihan yang paling logis.

4. Wilayah Meso Operasional

Isu-isu kritis yang muncul pada ruang lingkup ini adalah isu-isu kritis dalam sekolah atau lembaga pendidikan tertentu di mana suatu kesatuan pendidikan diselenggarakan. Lemahnya kemampuan mengelola penyelenggaraan sekolah dapat terlihat dari mutu perangkat penyelenggaraan yang dapat disediakan dan dikembangkan. Perangkat tersebut setidaknya-tidaknya terdiri atas sembilan komponen, yaitu

- a. Tujuan pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003
- b. Tenaga pendidik yang mengelola proses pembelajaran.
- c. Kurikulum yang berwujud petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi tenaga pendidik, orang tua atau tutor.
- d. Materi pendidikan yang berwujud bahan-bahan pembelajaran bagi siswa.
- e. Peserta didik, yakni siswa dengan ciri dan kualifikasi tertentu.
- f. Saran dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tersebut.
- g. Berbagai komponen pembelajaran untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran.
- h. Metode dan proses pembelajaran.
- i. Waktu belajar.

Agar mutu dan efektivitas pendidikan tersebut terkontrol dan tetap sesuai dengan misi pendidikan yang diemban, semua konsep di atas harus memenuhi standar atau kualifikasi tertentu dengan mengacu pada negara yang memiliki mutu pendidikan tinggi tanpa mengabaikan muatan lokal yang spesifik untuk masing-masing negara dan wilayah di Indonesia. Yang paling strategis dari elemen-elemen di atas adalah peserta didik, tenaga pendidik, dan sistem evaluasi.

5. Wilayah Makro Operasional

Wilayah ini mencakup isu-isu kritis tentang sistem pendidikan secara luas di tingkat nasional, seperti :

- a. Ketidakjelasan tujuan pendidikan di mata pengelola pendidikan, masyarakat umum, dan orang tua siswa.
- b. Validitas penjabaran tujuan tersebut ke dalam sistem kurikulum.
- c. Ketidakjelasan peran lembaga sekolah dalam keseluruhan aktivitas pendidikan di tengah masyarakat, serta.
- d. Kegamangan dalam penetapan kebijakan pendidikan.

Akibatnya, isu-isu kritis di atas, sampai saat ini, persoalan pendidikan kita berkenaan mutu, efisiensi, efektivitas dan relevansi yang diselenggarakan secara meluas di tengah masyarakat menjadi sulit dipertanggungjawabkan (*accountability*). Isu-isu kritis



itu seharusnya menjadi tanggungjawab seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) dengan koordinasi yang baik melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Solusi terhadap isu-isu kritis skala makros ini tidaklah mudah karena menyangkut sistem yang lebih luas yakni administrasi suatu masyarakat secara keseluruhan. Artinya, isu-isu kritis tersebut mensyaratkan kebijakana baru pemerintah untuk menelaah dan merenungkan langkah-langkah solusi yang sistemik dan bukan parsial.

Arah Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai isu-isu kritis yang muncul ditengah kehidupan kita, sebagaimana telah dikemukakan di atas, arah kebijakan yang perlu diambil pada skala :

1. Mikro Operasional, misalnya penyempurnaan kualitas tenaga kependidikan dan peningkatan fasilitas pendidikan.
2. Meso Operasional, misalnya penyempurnaan manajemen pendidikan, peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di dalam pendidikan, penyempurnaan sistem evaluasi pendidikan.
3. Makro Operasional, misalnya perluasan dan pemerataan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, pengembalian peranan guru/tenaga kependidikan, alokasi anggaran pendidikan, reorientasi fungsi dan pandangan masyarakat terhadap sekolah/lembaga pendidikan, evaluasi konsepsional, dan operasional sistem pendidikan nasional, penyempurnaan sistem kurikulum, dan teknologi instruksional. Teknologi instruksional adalah lapisan terbawah dari piramida sistem kurikulum. Ia berurusan dengan usaha-usaha peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar pada wilayah tempat siswa berinteraksi langsung dengan anasir pendidikan. Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatan studi, riset, dan pengembangan teknologi pembelajaran mencakup enam elemen, yaitu :

- a. *Content* atau pesan yang akan dibawahkan oleh kegiatan pendidikan atau pengajaran.
- b. *Person* atau orang-orang yang akan menyampaikan pesan tersebut kepada peserta didik melalui interaksi yang dirancangnya.
- c. *Media* atau bahan pembelajaran yang di dalamnya tersimpan berbagai pendukung kegiatan operasional pembelajaran.
- d. *Prosedur* atau skenario yang dirancang untuk mengoptimalkan hasil proses interaksi peserta didik dengan media dan person.
- e. Alat-alat yang akan membantu prosedut interaksi tersebut, dan.
- f. Lingkungan fisik-sosial tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Dengan perkataan lain, teknologi instruksional adalah “*software*” operasional bagi lembaga pendidikan sedangkan sistem kurikulum dapat dianggap sebagai “*software* konsepsional dari berbagai kegiatan pendidikan yang diselenggarakan secara meluas di tengah masyarakat atau bangsa tertentu. Artinya, sistem kurikulum dapat dipandang sebagai salah satu unsur terpenting dari sistem pendidikan yang akan diberlakukan secara



luas. Unsur lain yang justru menjadi kunci adalah tenaga kependidikan yang akan menjadi pelaksana kedua jenis "software" tersebut.

Dengan ditetapkannya panduan arah atau kebijakan untuk membangun sistem kurikulum dan teknologi instruksional, kita diajak untuk membenahi persoalan pendidikan sekolah ini dengan sasaran awal diarahkan pada wilayah yang langsung bersentuhan dengan siswa yakni merekayasa interaksi antar guru dengan muridnya.

Masih dalam kerangka sasaran awal dan berjangka pendek, penjabaran usaha tersebut difokuskan pada

1. Penyiapan kurikulum berupa bahan-bahan pembelajaran beserta petunjuk pelaksanaannya, dan
2. Penyiapan tenaga kependidikan yang mampu mengoperasikan bahan pembelajaran tersebut sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran awal tersebut tentu pada saatnya akan diikuti dengan pencapaian sasaran-sasaran berikutnya yang lebih kompleks, yakni membangun sistem kurikulum.

7. Strategi Umum Pemecahan Isu-isu kritis Pendidikan Nasional

a. Wilayah Mikro Operasional

- 1) Menempatkan tenaga kependidikan terbaik di lapangan operasional agar menghasilkan efek *hidden curriculum* dalam arti yang positif.
 - a) Aspek penguasaan strategi pembelajaran
 - b) Strategi belajar tuntas (*mastery learning*)
 - c) Strategi pengayaan (*enrichment*)
 - d) Strategi remedi (*remedial teaching*)
- 2) Meningkatkan kualitas berbagai aspek kegiatan mengajar (strategi, proses, manajemen, dan sistem evaluasi).
 - a) Pada proses belajar tradisional, dimana kegiatan belajar tergantung dan terfokus pada tenaga pendidik sebagai sumber ilmu dan perekayasa pendidikan.
 - b) Pada proses belajar menyelidiki (*discovery learning, creative learning*) yang menekankan pada pengalaman yang dilalui siswa.
 - c) Pada proses belajar mandiri (*student active learning*) dimana belajar terpusat pada aktivitas siswa, bukan lagi pada satu guru.
 - d) Aspek keterampilan mengefektifkan pembelajaran
 - e) Aspek peran tenaga pendidik sebagai mengajar pembelajaran. Mengembangkan wawasan profesional kependidikan pada tenaga pendidik.

3) Wilayah Meso Operasional

Perluasan kesempatan belajar yang bermutu dengan cara :

- a) Persebaran waktu belajar.
- b) Persebaran tempat belajar
- c) Peningkatan kemampuan pembiayaan yang sehat dan seimbang dan kontinyu

b. Wilayah Makro Operasional



Untuk mencapai misi pendidikan, kita perlu memprioritas kebijakan umum pendidikan nasional pada anasir yang strategis yang difokuskan pada enam butir berikut :

- 1) Mendorong pemerintah agar memperluas dan menguatkan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar.
- 2) Mengajak seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah, untuk melakukan tindakan nyata dalam rangka mengembalikan peran guru sebagai unsur kunci dalam pendidikan dan pembangunan bangsa. Memberantas kebijakan dan praktik-praktik masa lalu yang mengakibatkan degradasi, devaluasi dan distorsi peran guru dan pendidikan di tengah arus perubahan masyarakat. Tindakan nyata tersebut setidaknya menyangkut penataan menyeluruh dan mendasar terhadap kualifikasi profesional guru dan pendidik yang diikuti dengan sistem penghargaan (material dan non material yang setara).
- 3) Mengajak pemerintah untuk terus-menerus meningkatkan alokasi anggaran pemerintah bagi penyelenggaraan pendidikan yang mencerminkan tindakan nyata dalam pendidikan secara umum, hingga mencapai sekurang-kurangnya 25% dari APBN atau 10% dari *Gross National Product* (GNP) dalam 2 samapai 3 tahun mendatang.
- 4) Mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dan signifikan untuk mengubah distorsi alokasi pendidikan yang sangat berpihak pada pendidikan tinggi (hanya diikuti oleh kurang dari 1 % penduduk Indonesia). Distorsi ini sangat mengorbankan pendidikan dasar yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluas-luasnya warga negara.
- 5) Mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan evaluasi sistematis terhadap berbagai aspek konsepsional dan operasional dari Sistem Pendidikan Nasional pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Seluruh komponen bangsa dilibatkan dalam kegiatan pendidikan melalui jalur formal (persekolahan) atau melalui jalur nonfomal (pesantren, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan nonformal lainnya). Pelaksanaan wajib belajar misalnya, dikoordinasikan secara lebih baik sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Koordinasi antara lembaga pendidikan dengan industri atau kalangan bisnis sebagai penyedia dana lebih ditingkatkan. Jam belajar masyarakat benar-benar bisa dilaksanakan dengan pemantauan dari seluruh komponen masyarakat baik melalui jalur LSM, partai politik, maupun lembaga keagamaan yang mengakar di dalam masyarakat setempat. Hal ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mencerminkan kesanggupan menempatkan pendidikan sebagai usaha membangun masa depan Indonesia menuju masyarakat madani yang religius, mandiri, demokratis, majemuk, maju, sejahtera, dan adil.
- 6) Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggali dan merekonstruksi khasanah nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia yang religius dan majemuk untuk dijadikan landasan yang kokoh bagi pengembangan dan penyempurnaan terus-menerus kurikulum pendidikan nasional yang sah dan relevan dengan masa depan bangsa Indonesia.



C. KESIMPULAN

Paradigma baru pendidikan diperlukan untuk mendorong perubahan tatanan kehidupan menuju masyarakat madani. Perubahan itu diperlukan dilakukan secara mendasar pada semua wilayah operasional, baik menyangkut Undang-undang, kurikulum, maupun sistem evaluasinya.

Paradigma baru pendidikan perlu didukung oleh telaah kritis terhadap isu-isu pendidikan nasional, arah kebijakan, dan strategi pemecahannya. Isu-isu kritis pendidikan nasional yang muncul dapat dipetakan pada tiga ruang lingkup utama, yaitu wilayah mikro operasional, meso operasional, dan makro operasional sehingga strategi pemecahannya mengacu pada tiga ruang lingkup utama ini pula.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Djohar, *Kedaulatan Rakyat*. 4 Mei 1999. Yogyakarta.
- Suryani, R.B. dan Suidiana D. (1998) *Telaah Awal Terhadap Probem Pendidikan Nasional dan pemecahan masalahnya*". Makalah Dialog Nasional Pendidikan. 26 Desember 1998 IKIP Yogyakarta.
- Wahyoetomo (1993). *Beberapa Pokok Pikiran tentang Pelaksanaan Pendidikan Nasional sebagai Jawaban Atas Isu; Deregulasi Pendidikan*. PT. Grasindo. Jakarta.